

MASYARAKAT MARITIM PERLU WASPADAI Cuaca Ekstrem di Perairan Indonesia

JAKARTA (KR)--Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi tentang kemungkinan terjadinya cuaca ekstrem di beberapa wilayah di Indonesia. Karenanya, para nakhoda dan masyarakat maritim perlu mewaspadaai cuaca ekstrem dan gelombang tinggi yang mungkin akan terjadi dalam tujuh hari ke depan.

Mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan Maklumat Pelayaran Nomor 18/PHBL/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di seluruh Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang terkait keselamatan pelayaran.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad menegaskan, setiap pemberangkatan kapal harus selalu memperhatikan kondisi cuaca yang mengacu pada berita cuaca BMKG. "Bila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran, Syahbandar wajib menunda keberangkatan hingga kondisi cuaca memungkinkan untuk berlayar," katanya di Jakarta, Sabtu (13/2).

Lebih lanjut Ahmad menginstruksikan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, juga memastikan kegiatan bongkar muat berlangsung tertib dan lancar. Begitupun dengan muatan harus dilasing dengan baik dan tidak melebihi kapasitas angkut, nakhoda kapal harus mampu memperhitungkan stabilitas kapalnya tetap baik dan tidak over draft.

Menurutnya, cuaca menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam keselamatan pelayaran. Selama kapal berlayar, nakhoda kapal harus selalu memantau kondisi cuaca secara periodik setiap enam jam.

Jika terjadi cuaca buruk, kapal segera berlingung di tempat yang aman namun tetap harus siap digerakkan serta segera melaporkannya kepada Syahbandar dan Stasiun Radio Pantai (SROP) terdekat untuk menginformasikan posisi kapal dan kondisi cuaca.

(Imd)-f

Toserba di Slawi Terbakar

SLAWI (KR) - Toserba Mutiara Cahaya (MC) di Jalan Letjen Soeprpto Kalijembangan Kelurahan Pakembaran Slawi terbakar, Sabtu (13/2) pukul 00.15. Tidak ada korban jiwa, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kejadian tersebut menghebohkan warga sekitar. Belum diketahui pasti penyebab kobaran api yang membakar salah satu pusat perbelanjaan di jantung Kota Slawi itu.

Relawan TRC Kwarcab Tegal, Faizal mengatakan petugas pemadam kebakaran dibantu masyarakat langsung berusaha memadamkan api. Sementara itu warga setempat menyebutkan saat melihat kobaran api warga langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Petugas pemadam kebakaran langsung berusaha memadamkan kobaran api, dibantu warga sekitar.

Meski api sudah bisa dikendalikan, petugas Damkar, relawan dan Polri belum berani memasuki toserba tersebut. Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto membenarkan kebakaran tersebut. Pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi, termasuk kepada pemilik toserba.

(Ryd)-f

Gusti Moeng Sambungan hal 1
beberapa saat setelah berhasil keluar dari 'kurungan' selama tiga hari di keputren Kraton Surakarta sejak Kamis (11/2) hingga keluar Kraton Surakarta, Sabtu (13/2).

Diungkapkan, untuk menyudahi permasalahan atau polemik dan kegaduhan yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 serta sambil menunggu kepastian *sabda pangandikan dalem* Sinuhun Kangjeng Susuhunan Paku Buwono (PB) XIII, hubungan Kraton Surakarta Hadiningrat dengan pihak-pihak lain sementara waktu di jalankan oleh Lembaga Dewan Adat (LDA) Kraton Surakarta Hadiningrat dan akan dilakukan koordinasi sebaik-baiknya dengan Pemerintah Indonesia, pemerhati dan pecinta budaya serta KGPH Panembahan Agung Tedjowulan maupun *sentana*, *abdidalem* dan *kawula dalem* Kraton Surakarta Hadiningrat.

Di depan Kori Kamandungan Kraton Surakarta, GKR Timoer Rumbai yang akrab disebut Gusti Rumbay dan GKR Koes Moertiyah Wandansari mengatakan, mereka terkurung bukan mengurungkan diri. "Saya akan menemui pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang terlihat masuk Kraton Surakarta. Namun sampai di keputren, saya dan Gusti Rumbay serta tiga abdi dalem malah dikunci dari luar," paparnya.

Gusti Moeng juga membantah keras adanya kerabat Kraton Surakarta yang mengatasnamakan Sinuwun PB XIII yang menuduh dirinya sengaja mengurung diri di dalam kraton. "Setelah terkurung tiga hari tanpa ada air, gas untuk memasak, dan pasokan listrik dimatikan, saya malah ambil hikmahnya. Kondisi di dalam Kraton Surakarta telah rusak parah. Padahal Kraton Surakarta telah dinyatakan sebagai cagar budaya. Berarti negara juga bertanggung jawab untuk pembangunan atau renovasi bangunan cagar budaya seperti Kraton Surakarta," paparnya.

(Hwa)-f

Supaya

Supaya kita enggak *kepaten obor*," kata putri sulung Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan HB X ini.

Menurutnya, situs itu menandai pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat pada 13 Februari 1755.

Sejarah tidak boleh dilupakan dan harus memberi pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya.

"Kita harus tahu asal usul kita. Siapa, darimana dan sejarah enggak boleh kita lupakan. Lantas, bagaimana kita jaga dan merawat. Kita bangun bersama atau bikin semacam tulisan atau buku. Bersama Pemkab Karang-

anyar, akan saling mewar-nai dan melengkapi. Se-jarah bukan hal kuno, tapi ada tempat di bahu kita agar jaga bersama," ungkap GKR Mangkubumi.

Bupati Karanganyar, Juliyatmono meminta masyarakat berhenti menjadikan situs tersebut sebagai sarana bermaksiat.

"Jangan dibikin angker, wingit apalagi sampai mencari pesugihan," katanya, menceritakan situs yang dikelilingi tembok rendah serta berisi beberapa pohon tinggi besar itu.

Terkait penataan situs, ia menyepakati pembuatan destinasi wisata pen- didikan. Apalagi masyara- berata di tempat siap men- dukungnya dengan kulin- er khas Jantiharjo, yakni

. Sambungan hal 1
arum manis.

Napak tilas Perjanjian Giyanti pada tahun ini digelar tidak seperti biasanya pada malam hari, dengan hiburan dan pasar malam. Demi menegakkan protokol kesehatan, acaranya dipersingkat dan digelar siang hari.

Prosesi dimulai dengan sambutan para pejabat. Kemudian arak-arakan tumpengan dari masyarakat setempat. Dari Paniradya Keistimewaan Yogyakarta, ditampilkan geguritan macapat dipimpin Raden Bambang Nursinggih.

Sebelum acara berakhir, dilakukan penanaman pohon di plataran Situs Perjanjian Giyanti.

(Lim/Dev)-f

Kedaulatan Rakyat

KOTA PEKALONGAN TERANCAM TENGGELAM

4 Hektare Lahan di Temanggung Bergerak

TEMANGGUNG (KR) - Akibat lahan pertanian bergerak dan memutus akses jalan di Dusun Karanganyar Desa Ngaliyan Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung, petani setempat terancam gagal panen. Fenomena tanah bergerak di daerah tersebut berlangsung selama tiga hari.

Tanah bergerak di area seluas 4 hektare juga memutus saluran air pertanian dan mengancam Jembatan Singorojo sebagai jalur ekonomi di wilayah kabupaten tersebut. "Secara gravitasi, tanah longsoran menuju DAS Kali Bodri yang hanya berjarak sekitar 100 meter dan dapat menghempas pondasi jembatan Singorojo yang merupakan aset Bina Marga Jateng," kata Kepala Pelaksanaan BPBD Temanggung Dwi Sukarme, Sabtu (13/2).

Menurutnya, fenomena tanah bergerak antara lain dipicu hujan deras dengan intensitas sedang hingga tinggi, dengan durasi yang berjam-jam dalam beberapa hari terakhir di daerah tersebut. "Pihak Kecamatan Bejen telah melapor dan BPBD langsung menerjunkan tim untuk memantau pergerakan tanah," jelas Dwi Sukarme.

Dikatakan, tanah bergerak di area pertanian yang dikenal dengan blok

Semek tersebut menimbulkan longsor di lahan pertanian warga yang ditanami berbagai tanaman seperti jahe, ketela, cabai, sengon dan berbagai hasil bumi lain tersebut. Tercatat di area tersebut dimiliki 22 warga, yang semuanya petani. Di antaranya Tutik, Suwarto, Samsudin, Jumari, Suwandi, Surahman dan Rumlan "Kerugian masing-masing ditafsir sekitar Rp 10 juta yang didasarkan hasil panen sebelumnya.

Upaya yang dilakukan BPBD antara lain pendataan, koordinasi dengan perangkat desa, serta sosialisasi kepada kades dan warga agar waspada pada saat hujan. "Kontur tanah di lokasi tersebut labil serta berbukit. Pada tahun 2002 juga pernah terjadi tanah bergerak dan ditetapkan kejadian luar biasa tanah bergerak. Ada sekitar 50 KK yang ada di sekitar lokasi direlokasi ketika itu," ungkap Sukarme. Sementara itu, Kota



KR-Istimewa

Petugas meninjau lahan pertanian yang bergerak.

Pekalongan yang terletak di pesisir utara terancam tenggelam akibat *land subsidence* (terjadi penurunan tanah) sekitar 6 centimeter (cm) setiap tahun. Hal itu antara lain akibat banjir rob yang terus terjadi di 70 persen wilayah Kota Pekalongan. Belum lagi banjir luapan sungai yang ada di Kota Pekalongan.

"Penurunan permukaan tanah yang terjadi di Kota Pekalongan saat ini mulai mengkhawatirkan, karena menunjukkan penurunan yang semakin dalam," ungkap Kepala Bappeda Kota Pekalongan, Anita Heru Kusumorini.

Menurutnya, berdasarkan alat patok pengukuran yang dipasang oleh Badan Geologi Nasional di Stadion Hoegeng sejak Maret 2020, hingga Januari 2021 sudah terjadi penurunan tanah setinggi 4,9 centimeter.

"Sesuai penelitian Badan Geologi Nasional, penurunan terjadi 6 centimeter setiap tahun," tandas Anita.

Dikatakan, sejak Maret sampai Agustus 2020 alat patok di Stadion Hoegeng menunjukkan adanya penurunan tanah 2,7 centimeter. Penurunan tanah yang terus terjadi, membuat banjir rob semakin

parah. Tanah di Pekalongan adalah tanah endapan yang usianya tergolong muda, yang secara alami akan terus mengalami penurunan.

Berdasarkan penelitian, lanjut Anita Heru Kusumorini, penurunan yang terjadi di Kota Pekalongan lebih dari 2 centimeter. Kemungkinan ada faktor lain yang mempengaruhi *land subsidence* semakin dalam.

"Untuk memantau penurunan tanah, telah dipasang patok-patok pendeteksi penurunan tanah di wilayah Kecamatan Barat dan Selatan," jelasnya.

(Osy/Riy)-f

MENAG MINTA TIDAK GEGABAH

Menilai Seseorang Radikal

JAKARTA (KR) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta semua pihak untuk tidak mudah memberikan label radikal kepada seseorang atau kelompok. Penjematan predikat negatif tanpa dukungan data dan fakta yang memadai berpotensi merugikan pihak lain.

"Kita harus seobjektif mungkin dalam melihat persoalan, jangan sampai gegabah menilai seseorang radikal misalnya," ujar Menag Yaqut di Jakarta, Sabtu (13/2).

Stigma atau cap negatif, menurut Menag, seringkali muncul karena terjadinya sumbatan komunikasi. Untuk itu, menciptakan pola komunikasi yang cair dan dua arah adalah sebuah

keniscayaan, lebih-lebih di era keterbukaan informasi saat ini. Stigma radikal juga bisa jadi muncul karena seseorang kurang memiliki informasi dan data yang memadai terhadap sikap atau perilaku orang lain.

"Dengan asumsi itu, maka klarifikasi atau tabayyun adalah menjadi hal yang tak boleh ditinggalkan dalam kerangka mendapat informasi valid," ujar Gus Yaqut, sapaan akrab Menag.

Dengan model tabayyun ini, maka hakikatnya seseorang atau kelompok juga akan terhindar dari berita palsu atau hal-hal yang bernuansa fitnah.

Untuk itu, Menag Yaqut mengajak seluruh komponen bangsa un-

tuk mengutamakan komunikasi yang baik dan menempuh cara klarifikasi jika terjadi sumbatan masalah. Jika pola ini diterapkan, Menag optimistis, segala polemik berkepanjangan atau kekisruhan yang seringkali muncul dan merugikan bangsa ini bisa dicegah.

"Saya tidak setuju jika seseorang langsung dikatakan radikal. Kritis beda dengan radikal. Berpolitik memang bisa jadi pelanggaran seorang ASN. Namun soal lontaran kritik sah-saja sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwa kritik itu tidak dilarang," ujar Gus Yaqut.

Menag Yaqut menegaskan, terkait dugaan pelanggaran Din

Syamsuddin yang statusnya masih sebagai dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, sebenarnya telah jelas ada regulasi yang mengaturnya.

Prosedur penyelidikan pun telah diatur secara komprehensif oleh negara, antara lain melalui inspektorat maupun KASN.

Dengan dasar tersebut, Menag Yaqut berharap, semua pihak untuk mendudukkan persolan ini dengan proporsional.

"Persoalan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN sudah ada ranahnya. Namun, jangan sampai kita secara mudah melabeli Pak Din radikal dan sebagainya," tegas Menag Yaqut.

(Ati)-f

UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIVITAS

Vaksinasi Dilakukan Per Klaster

JAKARTA (KR) - Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dr Siti Nadia Tarmizi mengatakan pelaksanaan vaksinasi per klaster bagi masyarakat umum ditujukan untuk meningkatkan efektivitas sebuah vaksin.

"Jangan sampai vaksin sudah disebar luas, tapi ternyata efek yang kita harapkan, yakni penurunan angka kesakitan, kematian dan menciptakan kekebalan komunal malah tidak tercapai," kata dia saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (13/2).

Sebagai contoh, bila vaksinasi hanya dilakukan sekitar 10 persen kepada sebuah daerah dengan jumlah penduduk yang padat, maka tidak akan efektif untuk mencapai kekebalan kelompok atau mengurangi angka kesakitan dan kematian di wilayah itu.

Oleh sebab itu, pemerintah mengubah strategi sasaran vaksinasi dengan menentukan atau memfokuskan klaster mana yang perlu terlebih dahulu mendapatkan vaksin.

Berdasarkan peta jalan, vaksinasi bagi masyarakat umum diren-

canakan pada April 2021. Nantinya, Kemenkes bersama pemerintah daerah berkoordinasi terkait klaster mana yang paling mendesak untuk mendapatkan vaksin.

Ia mengatakan pelaksanaan vaksinasi secara klaster berarti pemerintah berupaya menyelesaikan vaksinasi secara populasi. Hal ini dinilainya lebih efektif dari pada memberikan dosis vaksin kepada masyarakat namun tidak mencapai target yang diharapkan. "Pendekatannya per wilayah, jadi satu wilayah kita bereskan," ujarnya.

Siti Nadia mengatakan vaksinasi per klaster juga atas dasar pertimbangan ketersediaan vaksin di tanah air. Apalagi, hingga saat ini pemerintah belum bisa memastikan atau mengendalikan jumlah dosis yang bisa diterima dari pihak penyedia.

Terkait sasaran vaksinasi kepada 181,5 juta masyarakat di tanah air, pada awalnya ditargetkan selesai pada Maret 2022. Namun, Presiden meminta sasaran vaksinasi tersebut bisa dirampungkan selama satu tahun saja.

(Ant)-f

Belum

dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk pengawasan di desa atau kalurahan dilakukan oleh Babinsa, Babinkamtibmas dan Linmas.

"Saya optimis apabila masing-masing pihak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, kebijakan PTKM mikro yang diharapkan bisa menekan jumlah kasus secara signifikan akan bisa diwujudkan," terangnya.

Juru Bicara (Jubir) Pemda DIY untuk penanganan virus Corona Berty Murtiningsih mengatakan kasus terkonfirmasi Covid-19 harian di DIY mengalami penambahan sebanyak 113 kasus, sehingga total kasus terkonfirmasi mencapai 24.925 kasus pada Sabtu (13/2). Sementara kasus sembuh bertambah signifikan sebanyak 370 menjadi 18.423 kasus. Adapun kasus meninggal bertambah 7 kasus, sehingga total kasus meninggal di DIY menjadi 582 orang.

"Penambahan kasus terkonfir-

masi positif harian masih mengalami kenaikan berdasar laporan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY. Sehingga masyarakat DIY tetap diminta disiplin melakukan protokol kesehatan 5 M yaitu Menggunakan masker, Mencuci tangan dengan sabun, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas dengan baik dengan tren kasus terkonfirmasi masih mengalami penambahan," tandasnya.

Berty menuturkan kenaikan kasus terkonfirmasi harian di DIY ini mayoritas 51 kasus dari hasil tracing kontak kasus positif, 32 kasus periksa mandiri, 29 kasus belum ada informasi riwayat dan satu skrining karyawan kesehatan. Dari hasil verifikasi data Dinkes Kabupaten/Kota tambahan 7 kasus meninggal di DIY yaitu kasus 18.222, kasus 19.012, kasus 20.812, kasus 20.824, kasus 21.108, kasus 23.846 dan kasus

. Sambungan hal 1
24.785.

"Jumlah sampel diperiksa sebanyak 1.027 sampel dari 1.001 orang di DIY. Case recovery rate (CRR) atau tingkat kesembuhan sebanyak 73,91 persen dan Case Fatality Rate (CFR) atau tingkat fatalitas kasus pasien terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 2,34 persen di DIY," jelasnya.

Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes DIY ini menambahkan persediaan Tempat Tidur (TT) di 27 Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY sudah ditambahkan hingga saat ini. Jumlah ketersediaan total bed di DIY mencapai 910 bed dengan jumlah bed yang terpakai sekitar 59,65 bed saat ini. "Ketersediaan bed bagi pasien rawat inap di RS DIY, kini bisa diakses melalui Sistem Informasi Rawat Inap (SIRanap) pada website corona.jog-japrov.go.id/info-kamar-rs," imbuh Berty.

(Ria/Ira)-f